

## Pengantar Perbandingan Administrasi Negara

### ***Pengantar Hukum Indonesia LENGKAP***

***Kehadiran buku Pengantar Ilmu Hukum (PIH) diharapkan dapat membawa manfaat terutama bagi Mahasiswa, para Dosen Hukum, Praktisi Hukum, Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim dan juga untuk umum. Selain itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang luas tentang dasar-dasar ilmu hukum, sehingga siapapun yang mempelajari ilmu hukum akan berusaha menegakan keadilan secara substantive bukan hanya keadilan secara prosedural.***

***Hukum Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Buku ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Mahasiswa akan disuguhkan materi yang amat mendasar tentang hukum di bab pertama, disusul dengan materi negara hukum, hukum administrasi negara dan berbagai teorinya, hukum kepegawaian, wewenang, serta tindakan pemerintah. Pentingnya good governance, perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara, lembaga Negara Republik Indonesia, serta sanksi administrasi juga termasuk dalam materi yang diajarkan. Tidak ketinggalan, penulis juga membahas hukum pemerintah daerah di akhir buku. Buku ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, baik strata I, II, dan III. Kehadiran buku ini akan bermanfaat dan menambah wacana hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta menambah wawasan para pembaca yang mempelajari hukum administrasi negara. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup***

***#MOHON DIPERHATIKAN Bahwa semua produk kami dijual dengan sistem pre order. Setelah dilakukan pembayaran, buku tersebut akan kami cetak sesuai jumlah pesanan. Kemudian akan kami kirim dalam waktu 7-14 hari (menyesuaikan dg antrian) Jangan lupa untuk selalu melakukan konfirmasi melalui pesan chat yang tersedia. Terimakasih***

### ***Perbandingan Sistem Hukum***

### ***Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara***

### ***Pengantar Ilmu Pemerintahan***

### ***PENGANTAR ILMU HUKUM***

### ***Pengantar hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia***

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan bagian dari Pengantar Ilmu Hukum (PIH) karena merupakan bagian kecil dari ilmu hukum di dunia. Akan tetapi, keduanya memiliki relevansi atau hubungan yang signifikan karena memiliki objek yang sama, yaitu hukum. Adapun buku ini pada prinsipnya menyuguhkan pelbagai materi terkait mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk memahami tata hukum di Indonesia dengan segenap seluk-beluknya. Materi buku ini berisikan mengenai konsep dasar hukum dan sistem hukum, Sejarah Hukum, Hukum Islam, Penggolongan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan sebagainya. Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa fakultas syariah, pengajar, para peneliti, pengamat, dan praktisi hukum.

Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para pimpinan pemerintahan dan negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran sungai. Jika yang dituang merah, merahlah seluruh sungai. Jika dituang madu, manislah semuanya. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang melembaga, keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. **KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH MASALAH MEMBUAT KEPUTUSAN ATAS PILIHAN-PILIHAN MASA DEPAN.** Kebijakan publik adalah menciptakan masa depan pada HARI INI. Masalahnya, sebagian besar kebijakan publik dibuat dengan asal-asalan, dengan analogi, bahkan intuisi. Kesembronoan berlanjut sampai dengan implementasi kebijakan.

Kesembronoan juga terjadi pada tataran manajemennya, ketika kebijakan publik disusun atas rangkaian perumusan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik tidak cukup dievaluasi, tetapi dikendalikan. Tanpa pengendalian kebijakan, kebijakan publik mudah untuk gagal menjadi kebijakan yang direbut dan diselewengkan pihak lain (derailed policy implementation). Buku ini memberikan gambaran tentang mengapa kita perlu membangun suatu negara dengan kebijakan publik yang unggul dan bagaimana? Disusun dengan keyakinan, bahwa tidak ada satu negara pun di dunia, khususnya negara-negara berkembang, lebih khusus lagi Indonesia, yang tidak mampu membangun kebijakan publik yang unggul untuk menghebatkan bangsa. Indonesia, sebagaimana setiap negara berkembang di dunia, dapat dan pasti bisa melakukannya, dengan dua syarat memahami arti penting kebijakan publik dan menyepakati bahwa memang sungguh-sungguh penting, dan mengetahui secara pasti bagaimana membangunnya. Dan, buku ini hanya tentang kedua hal itu!

Buku Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk menambah referensi mata kuliah hukum pemerintahan di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; Hukum, Hukum Islam, Konsep Negara, Konsep Negara Hukum, Konsep Negara Dalam Islam, Hukum dan Pemerintahan, Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Konsep Demokrasi, Konsep Politik Islam, Hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional, Konsep Jihad dan Radikalisme, Bab terakhir mengenai Keadilan dan Moralitas Hukum. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini menyampaikan materi kepada pembelajar tentang hal-hal yang perlu diketahui dalam memilih metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai metode yang bisa diterapkan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena politik problem-problem politik. Selain itu, buku ini juga dapat dipakai untuk mengenalkan kepada peneliti pemula dalam rangka menyusun skripsi dan tesis, dan merancang usulan penelitian (desain penelitian) dan tata cara menganalisis hingga menulis laporan penelitian. Beberapa contoh diberikan dalam buku ini untuk memudahkan pembaca memahami penerapan metode dalam mengkaji dan untuk mengembangkan dan desain penelitian ilmiah yang masuk akal dan sistematis menjelaskan fenomena politik untuk memahami dunia politik. Semoga buku ini bermanfaat kepada para pembelajar Ilmu Politik Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia

Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif

Het Nederlandsch staatsrecht

HUKUM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Subkultur politik dan administrasi Surabaya dan Medan

**Buku ini disusun untuk lebih memahami dan mempertajam pengetahuan pembaca serta memperluas pemahaman tentang tentang Ilmu administrasi publik dan perkembangannya mulai dari yang paling klasik hingga yang paling modern. Buku ini sangat cocok dipelajari para mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), pemerhati dan penggiat administrasi publik pada umumnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Buku ini terdiri dari : Bab 1 Konsep Dasar Ilmu Administrasi Publik dan Perkembangannya Bab 2 Disiplin Ilmu Administrasi Publik Bab 3 Paradigma Administrasi Publik Bab 4 Reinventing Government Bab 5 New Public Service (NPS) Bab 6 Pelayanan Publik** Buku ini sengaja disajikan untuk kalangan masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum yang masih baru mulai studinya di Fakultas Hukum. Karenanya penulis banyak membuka kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku ini dimasa akan datang. Kami menyadari bahwa tulisan dalam buku ini masih belum sempurna karena keterbatasan dari penulis, oleh karenanya harapan kami tersebut menjadi perhatian dari para pembaca untuk memaklulkannya.

Buku ini merupakan materi kuliah untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi yang memiliki 2 SKS pada Semester 1 (satu), Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Medan. Buku ini membahas 8 (delapan) unit kompetensi: (1) Gambaran Umum Administrasi, (2) Hakikat Ilmu Administrasi, (3) Pokok-Pokok Pikiran Administrasi, (4) Sejarah Perkembangan Administrasi, (5) Pembagian Ilmu Administrasi, (6) Hubungan Ilmu Administrasi Dengan Ilmu Lainnya, (7) Unsur-Unsur Administrasi, dan (8) Perbedaan Administrasi Negara dan Niaga. Semua kompetensi ini diajarkan kepada mahasiswa/i dengan tujuan agar mereka dapat memahami Ilmu Administrasi secara komprehensif ketika menyelesaikan studi dari Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Medan.

Buku Pengantar Ilmu Hukum ini merupakan dasar bagi mahasiswa hukum atau masyarakat umum yang ingin mempelajari hukum. Oleh karena itu, sasaran buku ini ditujukan untuk para akademisi, profesi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum untuk memberikan pemahaman awal guna mengantar para pembaca untuk mempelajari hukum selanjutnya. Buku ini kami rencanakan terdiri dari 14 (empat belas) bab. Diawali dengan bab yang membahas pengetahuan umum tentang Ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Selanjutnya bab-bab yang membahas manusia, masyarakat dan hukum; kaidah-kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya; pengertian hukum; tujuan hukum, fungsi hukum; sumber-sumber hukum; subjek hukum, objek hukum dan peristiwa hukum; aliran-aliran dalam hukum; penegakan hukum dan penemuan hukum; sistem hukum; hukum dan moral; dan terakhir membahas ilmu-ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum.

**Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium**

**suatu survei penjajakan dari sudut ilmu administrasi pembangunan**

**Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia**

**Hukum Pemerintahan**

**Pidana Kehutanan Indonesia**

Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia [HKD 101] merupakan salah satu Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum (MKDKH) yang merupakan mata kuliah wajib nasional yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang menempuh program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum di seluruh universitas di Indonesia. Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia memberikan dasar pengenalan dan pemahaman kepada mahasiswa (baru) khususnya tentang hukum positif di Indonesia. Karenanya dalam mata kuliah ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang tata hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia, serta upaya-upaya untuk mewujudkan tata hukum nasional. Selain itu, juga dibahas bidang-bidang hukum yang ada (misal: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara dan sebagainya), serta beberapa materi dari masing-masing bidang hukum tersebut yang pokok dan relevan, dengan tetap mengindahkan sistem hukum dan tata hukum, terlebih pada pembaruan hukum yang sedang berproses saat ini. Proses penegakan hukum juga menjadi bahan kajian, untuk itu kedudukan, peran dan kompetensi dari masing-masing lembaga peradilan akan mendapat perhatian pula. Mengingat penegakan hukum berperan sebagai inti dalam proses menuju tata hukum nasional baik melalui pembentukan yurisprudensi maupun melalui proses penemuan hukum. Tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia adalah agar mengerti dan memahami sistematis dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Dengan mempelajari hukum Indonesia (Hukum Positif Indonesia), dapat diketahui perbuatan atau tindakan apa yang memiliki akibat hukum dan perbuatan melawan hukum, juga bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apa kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia.

Ilmu Administrasi Pemerintahan adalah kumpulan pemikiran yang menghubungkan antara Kekuasaan Politik (Political Power) dan Proses-proses Administrasi Pemerintahan (The Governmental Process). Fenomena sosial yang menarik minat para ilmuwan politik untuk mengembangkan pemikiran ini bahwa perebutan kekuasaan, begitu juga bagaimana kekuasaan itu didistribusikan dan dipertahankan ada di setiap sistem politik dan sistem pemerintahan. Dalam praktiknya, fenomena kekuasaan itu direalisasikan dalam dalam sistem administrasi pemerintahan tertentu sesuai dengan filsafat, norma, kebiasaan dan pemikiran politik yang berkembang secara universal ataupun secara lokal di tempat fenomena itu berada. Oleh karena itu, bisa saja sistem administrasi pemerintahan di suatu negara berkembang berbeda dengan sistem yang sama di negara-negara lain di dunia meskipun negara tersebut menganut filsafat politik, misalnya demokrasi, yang bersifat universal. Misalnya, mengapa sebuah fenomena perebutan kekuasaan politik untuk jabatan presiden di Amerika Serikat berbeda dengan fenomena yang sama di Swiss meskipun kedua negara tersebut sama-sama berbentuk negara federal, mempunyai sistem politik demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer. Fenomena serupa juga terjadi di tempat lain. Hal ini bisa terjadi karena faktor lokalitas yang telah

disebutkan. Itulah sebabnya mengapa ada persamaan fenomena yang universal tetapi juga ada perbedaan yang bersifat lokal. Ilmu ini mempelajari persamaan dan perbedaan seperti itu, dan menemukan pola-pola tertentu yang muncul karenanya. □ Penulis

Indonesia adalah Negara hukum dan bukan *machtsstate* atau negara kekuasaan, *absolute state*, menandakan Indonesia mengedepankan hukum bukan absolutism dalam menjalankan roda pemerintahan. 1 Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. 2 Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan dan berdasarkan kepada hukum. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (3) Undang □ Undang Dasar NRI 1945. Yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum juga memiliki arti penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam suatu Negara, karena di atas landasan hukum terdapat Kepastian hukum sebagaimana Negara hukum baik dalam konsep *rechtstate* maupun konsep *rule of law*. 3

Secara umum, buku ini mengulas perkembangan, perubahan, dan warna-warni reformasi birokrasi di beberapa daerah di Indonesia. Reformasi birokrasi dalam konteks transisi dibahas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam hal hubungan antara reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik, praktik inovasi dalam kerangka hukum dan *governance* serta arah strategi inovasi yang berkesinambungan, serta regulasi dalam perkembangan inovasi di daerah. Secara khusus, buku ini menyajikan reformasi birokrasi dan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berhubungan erat dengan perkembangan masyarakat untuk menciptakan *good governance* di Indonesia. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia

Sistem politik Indonesia

Desentralisasi Asimetris dalam NKRI

Di Era Citizen Friendly

Sumber daya hutan yang diberikan kepada Bangsa Indonesia merupakan karuni Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Dengan jumlah yang sangat luas dan lebih dari 100 juta hektar, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Disamping itu, Indonesia merupakan negara terbesar ke-empat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC (million tonne carbon). memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan carbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia.

Buku dengan judul “Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus)” disusun sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang mengkaji masalah pemerintahan daerah dan pelaksanaan desentralisasi asimetris di Indonesia yang berbentuk Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah wacana dan perspektif atas kajian tersebut. Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi tuntutan tersebut tidaklah mudah terpenuhi, penyebabnya ialah keterbatasan daya beli dan ketersediaan literature itu sendiri. Dalam mata kuliah hukum tata negara khususnya, sesungguhnya telah banyak literature yang terbit akan tetapi dengan mempertimbangkan materi perkuliahan yang akan disampaikan sekaligus memudahkan mahasiswa mendalami pokok-pokok materi yang tersebar dalam berbagai literature itu, penulis terdorong untuk menyusun buku ini sebagai himpunan materi minimal yang bersumber dari berbagai literature yang telah ada sebelumnya. Menyadari betapa luasnya ruang lingkup materi hukum tata negara, penulis menyusun buku ini dalam dua jilid. Pada jilid satu ini yang terdiri dari lima bab akan mengetangahkan uraian tentang pendahuluan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hak asasi manusia. Sementara pada jilid kedua direncanakan menguraikan antara lain: konstitusi, kelembagaan negara, pemilihan umum, partai politik, otonomi daerah.

Pengantar Hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan merupakan matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat (dalam hal ini Indonesia), serta terikat pada waktu tertentu (dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saat ini saja). Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang/aturan/ketentuan/tata hukum yang berlaku di Indonesia. Objek Pengantar Hukum Indonesia adalah peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif Indonesia). Buku ini akan memberikan pemahaman bagi mahasiswa hukum strata satu, dua, dan tiga tentang apa yang dimaksud ilmu hukum terkait tentang definisi hukum, manusia, masyarakat, dan norma, tujuan hukum, fungsi hukum, subjek dan objek hukum, klasifikasi hukum, sumber hukum, serta tentang tinjauan umum hukum dalam Islam. Selanjutnya buku ini menjelaskan sejarah hukum di Indonesia dimulai zaman masa Majapahit, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan.

Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

English For Specific Purpose

Reformasi Birokrasi dalam Transisi

Pengantar Ilmu Pendidikan Perbandingan

Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Kebijakan Publik: Perbandingan, Praktik, dan Ideal

Buku ini diperuntukkan sebagai sumber bacaan bagi kalangan akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa yang berada di semester awal untuk mengenal dasar-dasar dan asas-asas hukum, para praktisi di bidang hukum, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari pengantar hukum di Indonesia dengan segala bentuk Hukum Positif (Ius Constitutum) yang berlaku dari masa ke masa. Uraian substansi dalam buku ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 12 (dua belas) bab yang terdiri dari : pengantar hukum Indonesia (Bab 1), Sejarah Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sistem Hukum (Bab3), Penggolongan Hukum (bab 4), Hukum Adat (Bab 5), Hukum Perdata (Bab 6), Hukum Pidana (Bab 7), Hukum Tata Negara (Bab 8), Hukum Administrasi Negara (Bab 9), Hukum Dagang (Bab 10), Hukum Agraria (Bab 11), dan Hukum Internasional (Bab 12).

Sebuah buku yang paling fundamental dalam membahas ilmu pemerintahan. Dikatakan demikian karena buku ini secara sistematis memetakan perdebatan makna ilmu pemerintahan, sistem pemerintahan, azas pemerintahan, dan dinamika politik pemerintahan dalam satu tarikan napa keilmuan. Empat poin ini adalah konsep yang sangat mendasar untuk memahami, memperdebatkan, dan perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sebuah disiplin keilmuan. Karena itu, perkembangan ilmu pemerintahan bisa ditelusik melalui pergeseran objek kajiannya. Dimasa lalu, objek kajian ilmu pemerintahan berpusat pada

lembaga-lembaga formal pemerintahan sekarang objek kajiannya bergeser yakni pemimpin politik, demokrasi, desentralisasi, dan lembaga pemerintah. Selain itu, buku ini juga merekam perubahan paradigma pemerintahan dari government menjadi governance. Dalam konsep government, pemerintahan diposisikan menjadi aktor yang memiliki kuas penuh dalam tata-kelola pemerintahan. Tidak hanya itu, dalam konsepsi government relasi kuasanya digambarkan sangat hirarkis dan berjenjang. Konsepsi pemerintahan seperti ini berubah menjadi governance. Governance memuat tiga pilar penyelenggara negara: pemerintah masyarakat, dan swasta. Karena itu dalam governance, pemerintah diharuskan berbagi kuasa dengan masyarakat sipil dan swasta. Semangat yang terkandung dalam governance adalah pengurangan kuasa pemerintah. Ideologi politiknya sangat liberal, yakni berusaha membangun pemerintah minimalis atau bisa disebut 'less government' Perubahan objek kajian dan pergeseran paradigma pemerintahan ditulis secara kritis dan argumentatif dengan menampilkan sebuah fakta. Menariknya lagi adalah dalam kerangka memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai perkembangan ilmu pemerintahan, maka ditelaah pula sejumlah pemikir klasik misalnya Plato, Aristoteles, Polybios, Machiavelli, Locke, Montesquieu hingga pemikir kontemporer seperti Dahl dan Ryass. Pilihan menghadirkan pemikir klasik dan kontemporer ini karena memiliki kontribusi dalam khazanah perkembangan ilmu pemerintahan modern.

Buku ini semula dibuat dalam bentuk buku ajar matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, tidak lama setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diubah (amendemen) pada paruh awal tahun 2000. Membahas berbagai persoalan ketika hukum sudah dibahas dari berbagai bidang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Internasional. Singkatnya, melalui buku ini siapa pun yang ingin belajar dan memahami berbagai persoalan dan sendi-sendinya diperkenalkan dengan cara yang ringkas dan menarik. Membaca buku ini, kita akan diingatkan pada dua referensi hukum yang terkenal, yang menjadi acuan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) dan berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, berjudul: Perihal Kaedah Hukum dan Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum (1979), buku yang ditulis oleh Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof Soerjono Soekanto itu sangat menarik di kalangan mahasiswa FH-UI karena banyak membuka wawasan dan memberikan pengetahuan mendasar tentang hukum itu apa dan berbagai bidang hukum, dengan cara yang sangat menarik. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

Survey report on the characteristics of the political and administrative culture of the East Javanese in Surabaya, East Java, and the Toba Batak in Medan, North Sumatra.

Pengantar Ilmu Hukum (PIH)

Pengantar Ilmu Administrasi

Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus

Hukum Tata Negara Suatu Pengantar

Hukum Administrasi Negara

Buku ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang mendalami materi Hukum Administrasi Negara, mahasiswa Ilmu Politik yang sedang mendalami Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara, mahasiswa program studi PKn dan Hukum serta mahasiswa lain yang sedang mendalami Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik.

Buku English for Specific Purpose: LAW ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan ilmu hukum pada para mahasiswa ; Ilmu hukum hanya digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran (instructional objective). Dalam proses pembelajaran, bahasa Inggris difokuskan pada tiga ketrampilan berbahasa, yaitu membaca, komunikasi verbal dan menulis. Membaca buku teks dalam bahasa Inggris merupakan masalah bagi para mahasiswa Indonesia. Pengertian sering terhambat karena mahasiswa kurang menguasai segi-segi linguistic seperti kosa kata dan kaedah bahasa Inggris. Dalam buku ini bahan bacaan dan dialog disadur dari buku-buku teks asli dan majalah 'Reader Digests'. Penulis hanya memberi perubahan sedikit disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Hukum, dan pengembangannya meliputi pada pengayaan kosa kata istilah-istilah hukum, pemahaman mahasiswa akan isi bacaan, tata bahasa Inggris, dialog dan menulis. Latihan-latihan juga diberikan, sehingga setelah menguasai isi buku ini, sangatlah diharapkan para mahasiswa dapat memperluas pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum.

Buku ini diperuntukkan sebagai sumber bacaan bagi kalangan akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi di bidang hukum, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari tatanan hukum di Indonesia beserta segala Hukum Positif (Ius Constitutum) yang berlaku dari masa ke masa. Uraian materi dalam buku ini ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 13 (tiga belas) bab yang terdiri atas Pendahuluan berisi Konsep dasar/pengantar Tata Hukum Indonesia (Bab 1), Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia (Bab 3), Sistem Hukum Dunia (Bab 4), Hukum Adat (Bab 5), Hukum Perdata (Bab 6), Hukum Pidana (Bab 7), Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Bab 8), Hukum Dagang (Bab 9), Hukum Agraria (Bab 10), Hukum Internasional (Bab 11), Peradilan Tata Usaha Negara (Bab 12), dan Hukum Acara (Bab 13).

Pengantar Ilmu Hukum ini merupakan fondasi dasar bagi mahasiswa atau masyarakat yang ingin mempelajari hukum, agar mahasiswa atau masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari hukum di Indonesia. Oleh karenanya, hemat kami buku Pengantar Ilmu Hukum yang ada di tangan pembaca sekarang ini dapat menjadi buku pegangan. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

Administrasi negara

Pengantar Ilmu Administrasi Publik

Laporan Musjawarah Ilmu Administrasi Negara dan Niaga

Pengantar Hukum Indonesia LENGKAP

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Buku Hukum Administrasi Negara yang kita sajikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku hukum administrasi negara yang ada sekarang karena membahas tentang hukum administrasi negara menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu. Kelebihan lain di dalam UU No 30 Tahun 2014 tersebut adalah penggunaan simbol " Citizen Friendly " dalam suatu produk aturan perundangan tersebut yang merupakan prototype baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundangan dalam kehidupan berbangsa khususnya Dalam Simbolisasi Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Dengan simbol itu suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan dijadikan dasar evaluasi dalam perjalanannya. Menarik untuk dicermati dan

ditelusuri kenapa simbolisasi tersebut sampai tercantum dalam produk hukum dan baru kali ini tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia. Rumusan tersebut tercantum secara eksplisit pada bagian penjelasan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014. Legislator Undang-undang ini terkesan ingin membangun image baru dan pesan baru yang sengaja dikobarkan lewat simbol itu. Yakni kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang “ ramah ” serta sifat kesamaan kedudukan antara “ penguasa ” dengan “ yang dikuasai ” . Citizen Friendly dalam bidang administrasi, biasa dikaitkan dengan reformasi birokrasi, yang dikaitkan dengan bagaimana membangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pesan yang lain terdapat keinginan berubah secara mendasar tentang administrasi pemerintahan di Indonesia, yang semula cenderung lebih menonjolkan faktor otoritas formal dari sebuah kekuasaan, berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah, dengan mendasarkan pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, dengan mendasarkan pada azas bahwa “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ” . Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan terbaru hukum administrasi negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan definisi, tindakan, perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat). Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Manakala proses peradilan pada Hukum Tata Usaha Negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. Sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa Hukum dan Ilmu Sosial lainnya, birokrat dan anggota legislatif, dan penting pula dipahami oleh masyarakat awam—untuk meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Perbandingan sistem hukum yaitu membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud membandingkan disini adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum mana saja yang mempengaruhinya. Mempelajari mengenai sistem hukum berarti harus berangkat dari sejarah hukum yang berbeda, walaupun aturannya agak sama, tetapi pasti berbeda. Namun apabila ada kesamaan aturan antara negara satu dengan yang lain, tetap mungkin ada perbedaan prosedur dan filosofinya. Pentingnya mempelajari perbandingan sistem hukum yaitu untuk menambah wawasan lebih luas sehingga mendapatkan pemahaman akan sistem hukum yang lebih baik dan untuk memprediksi sistem hukum tersebut apakah dapat diterapkan di negara Indonesia atau tidak. Secara garis besar di dunia ini meskipun dikenal ada lima sistem hukum, yaitu; civil law, common law, socialis law, Islamic law dan sistem hukum adat, tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia Internasional hanyalah dua, yaitu sistem hukum civil law dan common law.

Pengantar administrasi pembangunan

LAW

Pengantar Ilmu Hukum

PENGANTAR ILMU HUKUM DAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Hukum Pemerintahan Daerah

*Sistematika buku “Reformasi Administrasi Publik” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 8 Bab, diantaranya: Memahami Administrasi dan Administrasi Publik yang membahas tentang Pengertian Administrasi baik arti Sempit dan Luas, Pengertian Administrasi Publik dan Pembagian Administrasi Publik; Konsep Dasar Reformasi dan Reformasi Administrasi Publik membahas tentang Pengertian Reformasi, Pengertian Reformasi Administrasi Publik, Strategi Reformasi Administrasi Publik; Sejarah Perkembangan Paradigma Administrasi Publik membahas tentang Paradigma Old Public Administration, Paradigma New Public Management, Paradigma New Public Services dan Perbandingan OPA, NPM, dan NPS; Patologi Administrasi Publik membahas tentang Pengertian Patologi dan Patologi Administrasi Publik, Bentuk-Bentuk Patologi Administrasi Publik, dan Terapi Patologi Administrasi Publik; Lingkup Reformasi Administrasi Publik membahas tentang Tuntutan Reformasi Administrasi Publik, dan Tujuan Reformasi Administrasi Publik; Reformasi Aparatur Negara membahas tentang Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Reformasi Aparatur Negara ; Reformasi Pelayanan Publik membahas tentang Definisi Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, dan Reformasi Pelayanan Publik; dan Reformasi Birokrasi Pemerintah yang membahas tentang Pengertian Birokrasi, serta Reformasi Birokrasi Pemerintah.*

*Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*

*Pengantar Hukum Indonesia*

*Reformasi Administrasi Publik*

*Berita bibliografi*

*Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*